

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman. (2004). *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Agus Dedi. (2019). ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK . *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Alfath, T. P. (2020). EKSEKUTABILITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 287. doi: 10.29123/jy.v12i3.357
- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Arif Prasetyo, W. , E. W. W. , & N. T. H. (2022). *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. *Jurnal Kewarganegaraan*. Jurnal Kewarganegaraan.
- Arman, Z. (2018). TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23. doi: 10.33884/jck.v6i1.875
- Fitri Wahyuni (2017). *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fernando(2014). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. In *Revisi Keempat (p. 57)*. . Jakarta: Buku Kompas.
- Gialdah Tapiansari Batubara,(2020). *Dasar-Dasar HUKUM PIDANA*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Idil Akbar. (2016). PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Keraf, Gorys. (2009). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- KPU. (2024). *Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD Dalam Pemilu Tahun 2024*. Kpu.Go.Id.
- Lamintang, P. A. . (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.

- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 507. doi: 10.29210/1202323078
- Mega Putri Rahayu*, L. T. A. L. W. R. H. (2017). SISTEM PROPORSIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*.
- Mufidah, A. , & S. A. (2024). HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. . *THE REPUBLIC:Journal Of Constitutional Law*.
- Nasution, L. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. 'ADALAH, 1(9). doi: 10.15408/adalah.v1i9.11323
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno,(2021). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Kacung Marijan. (2010). *SISTEM POLITIKINDONESIA:KONSOLIDASI DEMOKRASI PASCA-ORDE BARU*. JAKARTA: KENCANA.
- Ratna, N. Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Yogyakarta.
- Rikardo, O. (2020). *PENERAPAN KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .* Jurnal Hukum Sasana.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. doi: 10.31078/jk1726
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R@D*. . Bandung: Alpha Beta, CV.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Partai Politik Peserta Pemilu: Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024